

	Perubahan Anggaran	perubahan anggaran							
7	SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BRIDA Pemerintah Provinsi Bali	Memuat informasi mengenai penyusunan PPAS SKPD dalam 1 tahun anggaran	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
8	SOP Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahunan BRIDA	Memuat informasi berupa PPAS SKPD dan penyusunan anggaran dalam periode 1 tahun anggaran	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
9	SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) BRIDA	Memuat informasi dalam penyusunan, menganalisis data dan informasi bahan laporan	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
10	SOP Penyusunan Laporan Tahunan BRIDA	Memuat informasi mengenai Menyusun, menganalisis data dan informasi laporan tahunan	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
11	SOP Penyusunan Evaluasi Kinerja BRIDA	Memuat informasi mengenai penyusunan dalam Menyusun evaluasi kinerja BRIDA	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
12	SOP Penyusunan Penetapan Kinerja BRIDA	Memuat informasi mengenai penetapan kinerja PD BRIDA Prov Bali	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
13	SOP Penyusunan Renstra BRIDA Provinsi Bali	Memiliki kewenangan dalam membuat dan Menyusun Renstra PD penyusunan, perencanaan program dan kegiatan PD untuk 5 Tahun kedepan	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
14	KAK Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memuat Informasi tentang Kerangka Acuan Kerja Evaluasi Kinerja BRIDA 2023	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
15	KAK Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memuat Informasi Tentang Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan BRIDA 2023	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
16	SOP Nomor: B.17.469.1/2110/SEKRET/BRIDA	SOP tentang Pengendalian Cuti Pegawai	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



17	SOP jasa komunikasi	Memuat informasi terkait pembayaran telpon	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
18	SOP jasa surat menyurat	Memuat informasi tentang surat menyurat	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
19	SOP Nomor: B.17.469.1/2109/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
20	SOP pencetakan dan penggandaan	Memuat Informasi terkait pelayanan percetakan dan penggandaan	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
21	SOP penyediaan jasa atk	Memuat informasi terkait penyediaan jasa atk	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
22	SOP penyediaan komponen instalasi listrik	Memuat informasi tentang penyediaan komponen listrik	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
23	SOP penyediaan makan minum	Membuat informasi tentang penyediaan makan minum	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
24	KAK Kegiatan	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
25	KAK Kegiatan	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
26	KAK Kegiatan	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
27	KAK Kegiatan	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
28	Keputusan Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor B.17.900/108/SEKRET/BRIDA	Memuat Informasi tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pelaksana	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		Teknis Kegiatan Pada Bari							
29	SOP Penyusunan Neraca dan Laporan Pertanggungjawaban	Memuat Informasi tentang Pertanggungjawaban keuangan BRIDA	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
30	SOP pengajuan surat perintah membayar	Memuat informasi tentang pengajuan surat perintah membayar	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
31	SOP pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Memuat Informasi tentang mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
32	SOP pembuat daftar gaji	Memuat Informasi tentang tata cara membuat daftar gaji	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
33	SOP sistem pengendalian Intern	Memuat Informasi tentang pengendalian loperan dan spj kegiatan	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
34	SOP pelaksanaan verifikasi	Memuat tentang Informasi tentang pelaksanaan verifikasi surat perintah membayar	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
35	KAK Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
36	SOP Keg.Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 2023	Memuat tentang informasi pelaksanaan kegiatann fasilitasi Kelompok Ahli Bidang Pembangunan	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
37	SOP Keg. Pengkajian Peraturan 2023	Memuat informasi tentang pelaksanaan kajian peraturan terkait Rancangan Undang-Undang	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
38	SOP Sensus Semesta Bali Berencana Sumber Daya Bali Berbasis Desa Adat 2023	Memuat informasi tentang kegiatan sensus desa adat	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



39	SOP Kegiatan Data tahun 2023	Memuat informasi tentang pelaksanaan pembuatan Jurnal Bali Membangun Bali	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
40	KAK Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/ regulasi/
41	KAK Kajian/ Penelitian Bidang Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	Memuat Informasi Tentang Penelitian Dan Pengembangan Pemulihan Jeruk Keprok Tejakula	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/ regulasi/
42	SOP kegiatan penelitian infrastruktur	Memuat informasi tentang kegiatan penelitian infrastruktur	Bidang Penunjang Pembangunan Daerah	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
43	SOP kajian bid keamanan	Memuat informasi terkait Kajian bidang keamanan	Bidang Penunjang Pembangunan Daerah	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
44	SOP kajian penelitian bidang ekonomi	Memuat Informasi tentang kajian penelitian bidang Ekonomi	Bidang Penunjang Pembangunan Daerah	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
45	SOP kegiatan ekonomi makro	Memuat Informasi tentang kegiatan ekonomi makro	Bidang Penunjang Pembangunan Daerah	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
46	SOP pendaftaran dan pemeliharaan KI	Memuat informasi tentang cara mendaftar dan pemeliharaan Kekayaan Intelektual	Kepala Badan	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
47	SK Gubernur Bali Nomor: 670/04-B/HK/2024	Tentang Penerima Penghargaan Kerthi Bali Swacitta Nugraha Bagi Peneliti/Pengembang/Penerap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Provinsi Bali	Bidang IV	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/ regulasi/
48	SK Gubernur Bali Nomor: 106/04-B/HK/2024	Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Bali Swacitta Nugraha Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Bidang IV	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/ regulasi/
49	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali	Tentang Pengangkatan Petugas Admin	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



	Nomor 5 Tahun 2024	Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin Sirup) di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali							/regulasi/
50	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2024	Tentang pembentukan dan Susunan Keanggotaan Agen Perubahan	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
51	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2024	Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
52	SK Gubernur Bali Nomor 25/04-C/HK/2022 Tahun 2022	Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
53	SK Gubernur Bali Nomor 24/04-C/HK/2022 Tahun 2022	Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sub Koordinator Unit Substansi	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
54	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor: 154 Tahun 2024	Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
55	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor: 20 Tahun 2024	Tentang Penunjukan Direksi Teknis/Pengawas Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelia	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
56	SK Kaban BRIDA Nomor 10 Tahun 2024	Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Tipe C Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
57	SOP Nomor: B.17.072/266/SEKRET/BRIDA	SOP tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



58	SOP Nomor: B.17.072/263/ SEKRET/BRI DA	SOP tentang Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
59	SOP Nomor: B.17.072/261/ SEKRET/BRI DA	SOP tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
60	SOP Nomor: B.17.469.1/21 07/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Penilaian Kinerja Pegawai	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
61	SOP Nomor: B.17.469.1/21 11/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Pengendalian dan Evaluasi Kehadiran Pegawai	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
62	SOP Nomor: B.17.469.1/21 12/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Pengusulan Pensiun Pegawai	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
63	SOP Nomor: B.17.469.1/21 13/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Pengusulan Penghargaan Satyalencana	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
64	SOP Nomor: B.17.469.1/21 14/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
65	SOP Nomor: B.17.469.1/21 15/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Perbaikan Sarana dan Prasarana	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
66	SOP Nomor: B.17.469.1/21 16/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Pengelolaan Surat Dinas Masuk	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
67	SOP Nomor: B.17.469.1/21 17/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Pengelolaan Surat Dinas Keluar	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
68	SOP Nomor: B.17.469.1/21 19/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Pengelolaan Dokumen Arsip	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
69	SOP Nomor: B.17.469.1/21 20/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/
70	SOP Nomor: B.17.469.1/21 21/SEKRET/B RIDA	SOP tentang Pengadaan Langsung	Sekretariat	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



71	SK Gubernur Nomor 122/04-B/HK/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Proposal Inovasi Daerah Provinsi Bali	Memuat tentang pembentukan dan susunan keanggotaan Tim IID	Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Sekretaris Daerah	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
72	SK Gubernur Nomor 123/04-B/HK/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali	Memuat tentang pembentukan dan susunan keanggotaan Tim IPKD	Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Sekretaris Daerah	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
73	SK Gubernur Nomor 176/04-B/HK/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penerbitan Jurnal Bali Membangun Bali	Memuat tentang pembentukan dan susunan keanggotaan Tim JBMB	Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
74	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor: 14 Tahun 2024	Tentang Penetapan Tenaga Pengelola Arsip Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
75	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor: 70 Tahun 2024	Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
76	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor: 110 Tahun 2024	Tentang Penyetaraan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Untuk Pegawai Tidak Tetap/Non Pns/Orang Pribadi Di Lingkungan Badan Riset Dan	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		Inovasi Daerah Provinsi Bali							
77	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor: 8 Tahun 2024	Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Kerja Pegawai Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
78	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor: 1431 Tahun 2024	Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
79	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor: 376 Tahun 2024	Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/
80	SK Kaban BRIDA Provinsi Bali Nomor: 377 Tahun 2024	Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025	Sekretariat	Kepala Badan	2024	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/regulasi/

Bali, 3 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BADAN

Ir. I Made Gunaja, M.Si

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19640620 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			<ul style="list-style-type: none"> UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 			
4		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
5		Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
6		Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



				yang bersangkutan		
7		Spesifikasi sarana komunikasi Sandi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c • UU No 11 Tahun 2008 	Selama sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
8		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Tidak Terbatas		
9		Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem



10		Peta Lokasi penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 	Selama masih berlaku	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
11		Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i 	Sampai ada persetujuan pimpinan	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
12		Rencana MoU (kerjasama)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f 	Sampai MoU dilaksanakan	Menghambat proses kebijakan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
13		Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g 	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
14		Rencana kerja Anggaran Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g 	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
15		Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat



			<ul style="list-style-type: none"> • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b 			
16		Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b			
17		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b 	Sampai dengan umur konstruksi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
18		Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 5 Tahun 2014 • PP No. 53 Tahun 2010 	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 			
19		Data Elektronik PNS (Database)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
20		Berkas/Arsip Data Pegawai (PNS/Non PNS) yang klasifikasinya dinyatakan pribadi (kesehatan, kondisi keluarga, pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
21		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
22		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
23		Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi



24		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
25		Dokumen Slip Gaji Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
26		Arsip Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
27		Data individu sensus dan survei	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 	Sampai mendapat persetujuan dari individu survei	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia
28		Identitas pemohon informasi	<ul style="list-style-type: none"> UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pemohon informasi	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia
29		Rekam Medis Keselamatan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Data Diri Pegawai



30		Nomor Rekening Bank Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Menjaga/Melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
31		Dokumen hasil pelaporan kekayaan (LHKPN, LHKASN) dan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagungan data

Bali, 3 Juni 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

 KEPALA BADAN
Ir. I Made Gunaja, M.Si
 Pembina Utama (IV/e)
 NIP. 19640620 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé

